

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

Nomor: 421.9/1222 /DISDIKBUD/2024

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga PKBM tentang Izin Pendirian, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

: Riduan, S.Pd.M.Si Nama

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih

Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa:

: PKBM Tunas Integritas Prabumulih Nama Lembaga

: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Jenis

: Iin Valentino,SH Ketua Lembaga

: JL RA Kartini Lorong Mataram Alamat

No. Telp/Hp : 082183222828

Setelah dilaksankanya Verifikasi Pada Tanggal 05 Juli 2024 oleh Tim Verifikasi dan telah memenuhi persyaratan (Izin Verifikasi Terlampir). Dengan ini mohon dapat diberikan Izin Pendirian terhadap Lembaga tersebut.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulin, 4 Juli 2024

inas Pendidikan dan Kebudayaan



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan KodePos: 31111 Telp/Fax: (0713) 3310678 Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) PROGRAM PAKET A,B DAN C NOMOR: 503.XII.10/001/DPMPTSP/2024

DASAR

- Undang-UndangNomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); B.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan; C.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan G. Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;;
 - Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : IIN
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1222/DISDIKBUD/2024tanggal 5 Juli 2
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).;

MENGIZINKAN:

KEPADA

UNTUK

Nama Pengelola/Penanggung Jawab

IIN VALETINO, SH

Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

JL. R.A. KARTINI NO. 30 KEL. SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

Nama Lembaga / Yayasan 1

Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar(PKBM), dengan data-data sebagai berikut :

2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH 88.990.431.4.313.000

3 Nama Satuan PKBM

PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH

Alamat Satuan PKBM

JL. R.A. KARTINI NO. 30 KEL. SUKAJADI KEC.

5 Berlaku s/d tanggal PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

15 Juli 2025

Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib meyampaikan laporan kegiatan operasional PKBM 2 secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendirian/Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan 3 Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014, maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.





Diterbitkan pada tanggal: 16/07/2024 09:00:29

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali., M.Si. NIP. 19660412 199312 1 001

Tembusan:

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. PrabumulihTimur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website: dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email: dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center: 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) PROGRAM PAKET A,B DAN C NOMOR: 503.XII.XII.11/002/DPMPTSP/2024

DASAR

- A. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

C. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;

- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- F. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
- G. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;

H. Memperhatikan:

- Śurat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : IIN VALENTINO, SH;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor: 421.9/1029/DISDIKBUD/2024tanggal 1 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).;

MENGIZINKAN:

KEPADA

Nama Pengelola/Penanggung Jawab

Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

: IIN VALENTINO, SH

JL. RA KARTINI LORONG MATARAM RT.004 RW.002 KEL.

SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar(PKBM), dengan data-data sebagai berikut :

UNTUK

Nama Lembaga / Yayasan

2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nama Satuan PKBMAlamat Satuan PKBM

: **PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH** : 88.990.431.4.313.000

PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH

JL. RA KARTINI NO. 30 KEL. SUKA JADI KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

5 Berlaku s/d tanggal ;

: 29 Juli 2026

Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib meyampaikan laporan kegiatan operasional PKBM secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendirian/Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014, maka izin tersebut akan dicabut.
- 4. Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.





Diterbitkan pada tanggal: 02/08/2024 14:23:21

DIMPTSP

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. Muhammad Ali., M.Si NIP. 19660412 199312 1 001

Tembusan:

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih